

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dari pembahasan yang telah di bahas pada bab sebelumnya adalah:

1. Implementasi Kerangka kerja yang ada dalam APSC terdapat didalam APSC 2035 itu sendiri, dimana terdapat beberapa sektoral yang membahas kajian-kajian tertentu. Diantaraya adalah permasalahan HAM, kestabilan Kawasan, Narkotika, cyber crime, terorisme dan pencucian uang. Disamping itu terdapat Tantangan Penerapan kerangka APSC bagi Negara Anggota ASEAN dan Indonesia adalah *pertama*, berupa tantangan dalam membentuk masyarakat berbasis aturan yang berorientasi pada nilai kebersamaan dan HAM. Pada hal ini inti dari tantangannya adalah permasalahan dalam memajukan prinsip dasar ASEAN berupa nilai, norma yang berorientasikan pada keselarasan hukum. Kesulitan terbesar pada konteks ini menyelaraskan dan mensinkronkan hukum dari sebelas anggota ASEAN memiliki sistem hukum yang mengacu pada paham dan stelsel hukum yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan negara anggota kesulitan dalam menyelaraskan hukum, termasuk halnya dengan Indonesia, Kedua, Tantangan Kerjasama di Kawasan ASEAN terhadap Peciptaan Kawasan Yang Damai, Aman Dan Stabil. Permasalahannya adalah merealisasikan kerjasama tingkat regional dengan sesama anggota ASEAN dalam bidang tertentu. Dalam hal ini meskipun draft APSC 2025 telah menggariskan bahwa setiap negara anggota ASEAN harus memperkuat kerjasama di bidang-bidang tertentu, diantaranya pemberantasan terorisme, peredaran narkotika, pelanggaran HAM, tindak pidana pencucian uang, korupsi dan permasalahan mengenai

batas negara. Saat ini Indonesia belum mampu merelaisasikan keseluruhann bentuk kerjasama sebagaimana yang telah digariskan pada draft APSC tersbut.

2. Upaya Negara Anggota ASEAN dan Indonesia dalam menghadapi tantangan dalam APSC 2025 adalah dengan cara meningkatkan kerjasama antara negara anggota ASEAN dan bekerja sama untuk merealisasikan program yang ada di dalam draft APSC 2025. Salah satu tantangan terbesar ASEAN pada saat ini adalah, walaupun APSC 2025 sudah menggagaskan banyak program untuk berbagai bidang politik dan keamanan, namun program tersebut tidak bisa dijalankan dikarenakan tidak adanya perjanjian kerja sama antar sesama negara anggota ASEAN yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum untuk terlaksananya program – program yang di didorong oleh APSC 2025.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Indonesia dan anggota ASEAN lainnya harus konsisten dalam membangun kerjasama untuk merealisasikan program yang tertuang dalam draft APSC 2025
2. Sinkronisasi hukum yang merupakan salah satu program APSC harus dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan bersama negara anggota ASEAN
3. Singkronisasi hukum tersebut seharusnya mengatur hal-hal yang mengarah pada bidang investasi dan perdagangan guna menghadapi MEA
4. Indonesia harus mampu menjadi negara pelopor dalam menyikapi dan merealisasikan program APSC 2025 dengan cara mendorong para Anggota ASEAN untuk lebih berkomitmen dalam mencapai dan merealisasikan program – program dari APSC 2025

5. Indonesia dan Negara Anggota ASEAN harus lebih intensif dalam menciptakan perjanjian kerja sama yang dapat mengakomodir program – program dan gagasan yang didorong oleh APSC agar ASEAN dapat mencapai tujuan – tujuan dari dibentuknya APSC.



